Pendidikan untuk Keberdayaan "Desa"[1]

Oleh: Bahruddin[2]

Setiap saat kita selalu mendapatkan berbagai informasi tentang pendidikan. Informasi yang menggembirakan selalu seputar prestasi "belajar". Kita berbangga ketika bangsa kita yang diwakili oleh Oge si Mutiara Hitam Septinus George Saa, seorang siswa dari Papua yang yang baru saja memenangkan event *The First Step to Nobel Prize in Physics* di Warsawa, Polandia. Tanpa berfikir sebaliknya bagaimana kondisi sekian ratus juta bangsa kita minus 1 orang tersebut. Sebut saja laporan PBB dalam *Human Development Report 2004*, kualitas pendidikan Indonesia (Education Index = 0,80) berada dibawah Vietnam (0,82) atau terendah di antara negara-negara ASEAN lainnya. Terlebih dari penelitiannya Unesco-OECD dalam Programme of International Student Assessment (PISA), Kecakapan membaca anak-anak kita (usia 15 tahun) sangatlah rendah (peringkat 39 dari 41 negara yang diteliti). Ini sungguh sangat memprihatinkan mengingat di era digital ini tuntutan kecakapan membaca sangatlah dibutuhkan untuk secara mandiri menyerap pengetahuan melalui media yang ada khususnya digital yang sudah tersedia tanpa batas ini.

Sedangkan informasi yang menyedihkan selalu seputar anjlognya prestasi anak didik disamping rendahnya atau tidak memadainya sarana belajar (sekolah). Kita selalu sedih manakala melihat tayangan tv tentang gedung-gedung sekolah yang roboh akibat kualitas bangunan yang buruk atau akibat bencana alam. Anak-anak pada belajar berhimpit-himpitan di bawah tenda sehingga tidak bisa berkonsentrasi penuh mendengarkan penjelasan dari seorang guru. Tanpa pernah berfikir kenapa belajar harus tergantung dengan gedung yang pengadaannya dibiayai dari hutang Luar Negeri. Sayang sekali, informasi seputar pendidikan yang berkontribusi langsung pada perbaikan kehidupan, pada perwujudan masyarakat yang berdaya, pendidikan yang secara mandiri diselenggarakan oleh komunitas setempat jarang sekali kita dapatkan.

Paradigma konvensional

Pada umumnya cara pandang terhadap pendidikan cenderung bias skulastik. Pendidikan telah terlembagakan sedemikian rupa menjadi sekolahan. Sekolah itu sendiri telah terjebak menjadi perusahaan bidang jasa. Para keluarga dengan anaknya yang datang ke sekolah tersebut tidak lebih hanyalah sebagai calon konsumen. Pola hubungan antara sekolah dan siswa mengikuti pola pasar yang kapitalistik. Ada penjual jasa dan ada pembeli jasa. Parameter keberhasilan sekolahan dilihat dari seberapa besar minat masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut terlebih masyarakat dari golongan ekonomi kuat. Upaya sekolahan memobilisir minat masyarakat dilakukan dengan strategi pemasaran yang jitu. Biasanya dengan menunjukkan bahwa di sekolahan itu tersedia guru-guru yang handal, sarana pendidikan yang memadai serta prestasi-prestasi yang sempat dicapai.

Sementara dari sisi masyarakat (pembeli) akan melihat seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan, seberapa mungkin (setelah lulus nanti) dapat melanjutkan ke lembaga pendidikan yang paling faforit, dan akhirnya seberapa besar peluang lulusannya dapat bekerja di perusahaan (*mendapat majikan*) yang diidam-idamkan. Bahkan tidak jarang kita jumpai dapat bekerja di tempat yang "basah", yang "sabetannya" banyak dan seterusnya. Yang sering dinilai lebih ideal lagi adalah dapat menciptakan lapangan kerja (*menjadi majikan*). Persoalan majikan itu majikan yang eksploitatif atau tidak, itu tidak penting.

Paradigma Qaryah Thayyibah, Arti Qaryah Thayyibah

Secara harfiah Qaryah Thayyibah diartikan dengan desa yang indah, baik, berdaya dan seterusnya. Yang dimaksud desa disini adalah kesatuan masyarakat dalam suatu wilayah yang lebih memungkinkan interaksi fisik antara satu dengan yang lainnya dalam waktu singkat. *Qaryah* bagian dari *Baldah.* Di Indonesia *Baldah* dapat diartikan dengan Kecamatan, Kota, atau Kabupaten. Sedangkan Qaryah dapat diartikan dengan dusun, desa, kampung, atau kelurahan. *Qaryah Thayyibah* dirasakan lebih dekat dengan semangat dasar *civil society* dibanding dengan masyarakat madani. Madani lebih bias kota (urban).

Tujuan pendidikan model Qaryah Thayyibah adalah Terwujudnya *desa yang berdaya.* Tidak hanya pada masyarakatnya tetapi juga pada sumberdaya alamnya. Pendidikan dalam prespektif ini tidak hanya ditujukan untuk memintarkan individu-individu dalam masyarakat, membangun sistem sosial yang demokratis, mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan, namun juga berorientasi pada kelestarian dan penguatan daya dukung sumberdaya alam.

Yang membedakan manusia dengan hewan adalah kesadaran yang dapat berkembang melalui proses belajar. Akan hilang ciri-ciri kemanusiaannya kalau tidak belajar. Belajar tidak perlu tergantung dengan

---

[1] Pernah disampaikan pada diskusi Forum YB Mangunwijaya "Membedah Pendidikan Alternatif di Indonesia" di hotel Santika tanggal 23 Pebruari 2006, kerjasama antara Dinamika Edukasi Dasar dan Harian Kompas, disampaikan kembali dalam "Konferensi Warisan Otoritarianisme: di Bawah Tirani Modal, Privatisasi Pendidikan", tanggal 5-7 Agustus 2008 di FISIP UI.

[2] Pengelola SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga

adanya apa dan siapa. tidak adanya guru, gedung sekolah, bangku-kursi, seragam, sepatu, buku, komputer adalah hal yang wajar dan biasa. Dimanapun juga akan sangat mungkin terjadi. Yang justeru tidak masuk akal adalah ketika tidak tersedianya itu semua, manusia berhenti belajar. Kita tidak perlu risau ketika terjadi putus sekolah. Adalah bencana kemanusiaan ketika terjadi putus belajar termasuk bagi mereka yang "sekolahan". Sementara yang dominan terjadi di sekolah justeru bukan proses "belajar-mengajar" tetapi lebih pada "mengajar-diajar". Untuk belajar, dimulai saja dari sumberdaya yang tersedia.

Ketika dibutuhkannya media pendukung proses belajar, pikirkan sambil berjalan untuk memenuhinya dengan mengelola sumberdaya yang tersedia. Jangan menunggu tersedianya perangkat pendukung baru berikutnya belajar. Suatu contoh di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah yang penulis kelola. Setelah dianalisis ternyata yang justeru sangat dibutuhkan adalah tersedianya komputer bagi siswa. Maka, sambil belajar diupayakanlah bersama dengan mengelola uang saku anak per hari Rp 2.000. Kalau harga komputer itu 1 juta rupiah per unitnya, tentunya dengan mengumpulkan uang selama 500 hari komputer itu akan dapat disediakan. Ternyata baru berjalan 200 hari pengelola sudah dapat mencarikan talangan untuk pengadaan komputer bahkan seharga Rp 1.400.000,- per unitnya.

Dengan demikian pendidikan komunitas ini tidak berurusan dengan murah atau mahal. Pada kasus tidak ada uang sama sekali, tidak ada kepedulian dari negara dan dari manapun juga, belajar tidak bisa berhenti. Berikutnya belajar musti dimulai dari semangat kebersamaan. Kemandirian komunitas adalah saling ketergantungan antara satu dengan yang lain.

Metode pembelajaran

Konsep dasar pendidikan komunitas meniadakan guru mengajar. Konsep KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) ditiadakan. Yang ada adalah belajar bersama. Persyaratan utama bagi guru adalah adanya kemauan belajar dan memiliki pengalaman yang lebih dalam hal strategi belajar dan bukan metode mengajar. Posisi guru sebagai teman belajar bagi siswa. Dalam satu kelas cukup dibutuhkan satu orang guru yang akan menemani siswa dalam seluruh "Mata Pelajaran". Seorang guru tidak perlu menguasai seluruh materi "pelajaran". Ketika ada beberapa guru yang memiliki beberapa "kelebihan" dalam hal penguasaan materi tetap tidak melakukan "mengajar" tetapi lebih memposisikan diri sebagai *resource person,* sebagai *salah satu* obyek yang sewaktu-waktu siap di"eksploitasi" oleh para murid. *Resource* yang lain bisa berada di kebun, di sawah, di lingkungan murid lainnya, di buku, di *compact disc*, juga penjelajahan di internet.

Bagi masyarakat khususnya orang tua/wali murid tidak perlu mengejar-ngejar anak untuk "belajar". Justeru sebaliknya, yakni minta bantuan pada anak untuk menjawab persoalan yang dihadapi sehari-hari. Misalnya saja orang tua murid yang kebetulan sehari-harinya beternak kambing, minta saja pada anak agar dibahas bersama teman-temannya bagaimana mencari bibit kambing yang baik, bagaimana teknologi mengolah kulit kambing, bagaimana pemasarannya dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga bagi guru, justeru selalu mengajak murid untuk terus melakukan assesmen kebutuhan yang dihadapi oleh keluarga si murid. Kebutuhan tidak hanya melulu pada persoalan ekonomi atau teknologi tapi lebih luas dari itu termasuk kebutuhan berkeluarga dan berbangsa sehingga pemahaman murid berikut masyarakat atas nilai-nilai keadilan, Hak Asasi Manusia, demokrasi, kesetaraan gender, kelestarian lingkungan, sampai dengan kewarganegaraan dapat tertanamkan.

Rekomendasi untuk Penguasa

Pertama, fasilitasi jaringan ICT. Tidak masuk akal jika 5500 tahun yang lalu tepatnya di Mesopotamia tempat ditemukannya teknologi roda oleh bangsa Someria, kalau penguasa setempat masih memfasilitasi media yang bertentangan dengan perkembangan teknologi. Demikian juga ketika setelah ditemukannya kertas oleh Ts'ai Lun pada abad 2. Tidak lucu kalau kertas sudah bisa menggantikan kulit kambing terutama setelah ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg sebagai media tulis menulis, penguasa setempat masih saja tidak mau memfasilitasi gerakan pencerdasan warganya dengan media yang sesuai di eranya.

Demikian juga dengan era sekarang ini. Era digitalnya para *Millennials* (generasi milenium) yang hadir di dunia ini pada awal 1980-an. Mereka adalah pemilik sah era ini, penghuni era ini. Kita yang hadir sebelum itu sudah sepantasnya harus menyesuaikan diri, karena kitalah sebagai pendatang. Sangat tidak masuk akal kalau masih saja ada guru yang mendektekan materi pelajarannya pada anak didik. Sama saja prilaku itu menghambat bahkan merampas hak dan kesempatan berkembangnya anak-anak generasi *Millennials*. Juga pemborosan yang semestinya tidak perlu terjadi. Banyak daerah (Kabupaten/Kota) yang membelanjakan Puluhan miliar rupiah APBDnya untuk pengadaan buku terbitan Balai Pustaka yang sudah *out of date* dan tidak digunakan lagi. Sebut saja angka 10 Milyar sudah dapat diwujudkan *Compact Disc* sebanyak 10 juta keping atau setara 10 juta almari buku.

Akankah para penguasa kita tidak mau menyadari terus bahwa tidak ada bedanya antara mereka dengan kaum Jahiliyah yang berkuasa? Ada satu contoh kongkrit yang penulis alami sendiri. Di Dusun Nglelo Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, SPPQT bersama Indo.net Salatiga telah mendampingi masyarakat setempat menyelenggarakan pendidikan alternatif. Sarana yang disediakan pertama kali adalah jaringan internet. Ternyata hasilnya teramat fantastis. Betapa tidak anak-anak yang tidak mungkin bisa sekolah karena harus naik turun gunung berkilo-kilo meter menuju sekolah terdekat itu, dengan difasilitasinya tempat belajar di rumah mereka sendiri, ternyata hasilnya mampu jauh mengungguli SMP induknya.

Jaringan internet jauh lebih efektif kontribusinya dalam mencerdaskan anak bangsa dibanding membangun gedung SD INPRES dengan biaya tinggi yang kehadirannya tetap memposisikan sebagai barang asing bagi masyarakat di desa. Masyarakat hanya menjadi konsumen. Belajar saja dari Thailand yang tengah berusha sekuat tenaga fasilitasi jaringan internet ke desa-desa. Pada penilaian terakhir tentang kualitas pendidikan pada 14 negara-negara berkembang di Asia Pasifik yang dilakukan oleh UNESCO – ASPBAE, Thailand menduduki peringkat pertama. Sementara Indonesia berada di peringkat 10 dan khusus input quality termasuk didalamnya kualitas guru terlatih Indonesia berada di peringkat 14 dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik!

Kedua, fasilitasi kesejahteraan guru. Kendati guru pada konsep Qaryah Thayyibah ini adalah sekaligus murid, dia tetaplah seseorang yang harus meluangkan waktu khusus dan meninggalkan kewajiban terhadap keluarganya. Namun, guru tetap berbeda dengan konsep pekerja pada sebuah perusahaan jasa. Guru tetap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan pencerdasan anak bangsa. Konsep Qaryah Thayyibah dalam hal kesejahteraan guru menggunakan konsep "bengkok". Konsep bengkok telah dikenal luas masyarakat Jawa. Seorang Lurah tidak mendapatkan bayaran bulanan (gaji) namun mendapatkan bengkok. Yakni sebidang tanah yang harus diproduktifkan. Untuk bisa memproduktifkan tanah bengkok harus melibatkan petani penggarap yang keuntungannya dibagi antara Penerima hak bengkok dan petani penggarap. Artinya seorang lurah ketika berfikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan dirinya secara otomatis harus juga berfikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani di desanya dengan mengembangkan manajemen produksi. Disamping sarana pendukung utama produktifitas tanah bengkok seperti sistem irigasi, konservasi air, kesuburan tanah yang harus diupayakan pengembangannya, manajemen pasca produksi seperti pengolahan hasil pertanian dan perdagangan yang menguntungkan masyarakat juga harus difikirkan oleh seorang Lurah.

Seorang guru pada sekolah komunitas sudah semestinya demikian juga. Dia tidak perlu dibayar bulanan sebagaimana berlaku bagi para pekerja di perusahaan-perusahaan, namun diberikan bengkok yang tidak harus berupa tanah. Bengkok bisa saja berupa kambing, atau alat produksi lain. Misalkan saja bengkok berupa kambing. Setarakan saja 5 tahun gaji seorang guru yang 1 juta per bulan, maka bengkok bagi seorang guru cukup 60 juta. Angka ini taruh diwujudkan kambing seharga 500 ribu per ekornya maka akan ada 120 ekor kambing. Kambing ini nanti selanjutnya digaduh oleh para petani yang menjadi wali murid dengan bagi hasil misalnya 40 untuk guru : 60 untuk petani (lebih menguntungkan petani dibanding hitungan umumnya yang 50 : 50). Karena umumnya dalam waktu satu tahun seekor kambing akan beranak 2 kali dan sering beranak kembar. Artinya dalam waktu satu tahun 120 ekor kambing akan beranak 240 ekor (dengan pengandaian hanya beranak 1). Dari 240 ekor kambing itu taruh diberikan ke petani yang 140 ekor maka sang guru akan mendapatkan 100 ekor. Dikalikan 500 ribu maka seorang guru akan mendapat keuntungan 50 juta per tahun atau 4 juta per bulan (4 kali lipat dibanding gaji 1 juta per bulan).

Dari ilustrasi diatas, beban pemerintah akan diperingan karena hanya mengeluarkan untuk modal kerja yang setara gaji lima tahun. Bandingkan dengan sistem upah bulanan yang sangat membebani negara sehingga utang negara akan menumpuk. Bagi guru sendiri akan sangat menikmati karena ternyata terimanya bahkan mencapai 4 kali lipat. Bagi Petani penggaduh juga dapat menikmati karena mendapatkan kesempatan berproduksi yang memang sudah biasa digeluti (artinya kemungkinan berhasil lebih besar karena bukan usaha rintisan bahkan *bankable*). Bagi desa tentunya konsep semacam inilah yang akan menggerakkan ekonomi produktif desa. Dibarengi dengan kegiatan pembelajaran yang lebih membuka peluang berkembangnya daya kreasi dan inovasi masyarakat, pasti masyarakat tidak akan berhenti pada budidaya saja. Mereka pasti akan berfikir yang lebih dari itu. Mereka akan berfikir bagaimana kalau dikembangkan usaha pengolahan daging kambing, pengolahan kulit kambing, pengelolaan pakan ternak, pengawetan rumput untuk persediaan pada musim kemarau dan seterusnya dan seterusnya. Bengkok bisa saja berupa mesin cetak, CD duplikator, kamera video shoting dan lain lain.